

AKUNTABILITAS PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT DI DESA WANAMUKTI BARAT KECAMATAN BOLANO KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Wayan Eko Safitri¹, Slamet Riyadi, Fiki Ferianto

¹Program Studi Administrasi Publik, Universitas Tadulako
Alamat Email 31ekasafitri@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk Mendeskripsikan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Wanamukti Barat Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, adapun penentuan informan menggunakan Teknik purposive Sampling. Kriteria yang dikembangkan oleh Mark Bovens (2006) sebagai alat analisis diantaranya : Prover provision of information (ketersediaan informasi), Proper Debate (Ruang Diskusi), dan Proper Judgment Procedure (Penilaian yang tepat). Penelitian ini menemukan akuntabilitas pada program PAMSIMAS di Desa Wanamukti Barat Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong belum Akuntabel. Hal ini disebabkan oleh penyampaian informasi mengenai program sangat terbatas di masyarakat, ruang diskusi masih bersifat eksklusif bagi kaum laki-laki sementara tidak ada ruang bagi kelompok perempuan, adanya perbedaan antara capaian program dengan fakta di lapangan dan informasi tidak menjangkau semua orang di desa, juga terutama kurangnya partisipasi masyarakat

Kata kunci: Akuntabilitas, PAMSIMAS, Partisipasi

Submisi: 30/01/2024

Diterima: 31/01/2024

Dipublikasikan: 31/01/2024

PENDAHULUAN

Masalah ketidakmerataan masyarakat dalam mengakses air yang layak di beberapa daerah di Indonesia mengharuskan pemerintah untuk turut andil dalam memberikan pelayanan air bersih baik untuk minum maupun untuk keperluan yang lainnya. Dalam rangka mencapai target akses air minum dan sanitasi yang menyeluruh serta target *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan maka pemerintah

membentuk suatu program berbasis masyarakat yang diberi nama PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat). Hal ini diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya No 38/KPTS/DC/2017 tentang Penetapan Desa/Kelurahan Kebijakan Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat. Program PAMSIMAS merupakan salah satu program unggulan pemerintah dalam penyediaan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat pedesaan dan pinggiran kota melalui pendekatan berbasis masyarakat.

Dalam menjamin akuntabilitas, program PAMSIMAS melakukan kegiatan pembangunan layanan air minum dan sanitasi perdesaan. Dengan dukungan kegiatan yang diselenggarakan secara kontraktual (konsultan dan non konsultan) dan swakelola oleh pemangku kepentingan terkait. Pelaksanaan kegiatan tersebut dituntut memiliki akuntabilitas yang memadai terutama dalam hal pelaporan dan pertanggungjawaban, sehingga dalam kegiatan perlu dilakukan verifikasi oleh penyelenggara kegiatan. Namun, program-program yang dilaksanakan pemerintah seringkali bermasalah dari aspek akuntabilitasnya, Pengawasan/akuntabilitas terhadap pengelolaan penyediaan air minum masih lemah, belum ada sanksi untuk penyelenggara air minum yang tidak memberikan pelayanan sesuai dengan syarat yang ditentukan. Menurut Mark Bovens, 2006 menjelaskan bahwa Perspektif evaluatif internal adalah melihat kualitas dari proses akuntabilitas itu sendiri, apakah prosedur tersebut memenuhi persyaratan minimum dari prosedur akuntabilitas yang dilihat melalui tiga aspek yaitu: ketersediaan informasi, ruang diskusi dan penilaian prosedur. Fenomena mengenai permasalahan akuntabilitas program juga terjadi di Desa Wanamukti Barat Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong. Desa ini merupakan salah satu desa yang terpilih dan ditetapkan sebagai desa sasaran program PAMSIMAS I pada tahun 2018 dari 27 desa kuota yang ditetapkan sebagai desa sasaran program. program PAMSIMAS telah diselenggarakan sebanyak dua kali namun menemui kebuntuan dan belum ada keberlanjutan untuk terkait program. Masalah ini penting untuk diteliti karena belum terdapat kesesuaian antara tujuan yang ditetapkan dengan hasil yang dicapai oleh program PAMSIMAS.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu menguraikan serta menginterpretasikan data yang diperoleh di lapangan dari para informan, hasil pengamatan serta data dokumentasi lainnya. Menurut (Sugiyono, 2014) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Bogdan dan Taylor mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. (Nugrahani, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas dalam penelitian ini adalah pertanggungjawaban dari implementor program PAMSIMAS sebagai pemegang amanah kepada masyarakat desa Wanamukti Barat sebagai pemberi Amanah. Dalam penelitian ini terdapat beberapa indikator yang dikemukakan oleh Mark Bovens, 2006 yang dapat dilihat dan dapat dijadikan acuan oleh peneliti untuk melihat akuntabilitas pengelola program PAMSIMAS dan pemerintah desa Wanamukti Barat.

1. Proper Provision of Information (Ketersediaan Informasi)

Prover Provision of Information (Ketersediaan Informasi) bertujuan untuk mengevaluasi akuntabilitas program mengenai informasi yang diberikan apakah jelas, terkait dengan proses pelaksanaan program, apakah program terlaksana sesuai dengan syarat dan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan teori, penelusuran peneliti dan hasil wawancara serta data pendukung yang diperoleh dimana proses pemberian informasi yaitu secara langsung melalui sosialisasi, pemasangan baliho dan poster. Maka dari itu penulis dapat menanggapi bahwa ketersediaan informasi mengenai program sudah cukup terbuka dan upaya yang dilakukan sudah cukup baik namun masih belum bisa mencakup seluruh masyarakat mungkin akan lebih baik jika dilakukan sosialisasi per dusun untuk memaksimalkan penyebaran informasi. Begitu pula mengenai pertanggungjawaban ketersediaan informasi tentang proses dan pencapaian program

yang diberikan oleh implementor dimana penyebaran informasi hanya dilakukan sebanyak tiga kali dalam kurun kurang lebih satu tahun pengerjaan program dimana informasi yang disampaikan mengenai gambaran umum dan rencana pengerjaan program.

2. Prover Debate (Ruang Diskusi)

Prover Debate (Ruang Diskusi) bertujuan untuk mengevaluasi akuntabilitas program dalam forum antara aktor dan masyarakat mengenai program yang terlaksana dimana dalam forum ini aktor dan masyarakat dapat berdiskusi dengan jelas mengenai informasi-informasi terkait pelaksanaan program. Peneliti dapat melihat bahwa pada aspek **Ruang Diskusi** kurang optimal namun sudah cukup terbuka dan memberikan kesempatan berpendapat serta informasi yang disampaikan cukup jelas namun peneliti melihat bahwa diskusi yang dilakukan kurang optimal bukan tanpa alasan peneliti mengatakan hal tersebut hal yang mendasari peneliti memberikan argument tersebut ialah diskusi hanya dilakukan tiga kali di awal turunnya program hingga program berakhir sedangkan program ini dilaksanakan kurang lebih satu tahun yang seharusnya memiliki banyak ruang diskusi antara implementor dengan masyarakat. Begitu pula dari hasil dokumentasi yang dilihat oleh peneliti dimana partisipasi masyarakat dalam diskusi yang hanya melibatkan pihak laki-laki dalam

mengambil keputusan sedangkan salah satu tujuan program PAMSIMAS yang diatur dalam standar operasional prosedur ialah “Kesetaran Gender - Program Pamsimas memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan maupun laki-laki, untuk mengambil keputusan, berpartisipasi aktif dalam semua kegiatan dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan sarana air minum dan sanitasi. Dimana salah satu hal yang menjadi tantangan yaitu kesetaraan gender dalam program ini bertabrakan dengan kultur masyarakat suku bali yang merupakan suku yang menjadi mayoritas di Desa Wanamukti Barat yang identik dengan membagi ruang antara laki-laki dan perempuan yang memiliki perbedaan peran khususnya pada program ini dalam hal diskusi hanya kaum laki-laki yang hadir karena masyarakat menganggap bahwa laki-laki lebih memahami dan lebih pantas untuk berdiskusi terkait dengan program sehingga sulit untuk kaum wanita berpartisipasi dalam hal diskusi program khususnya.

3. Proper Judgment Procedur (Penilaian Yang Tepat)

Proper judgment procedure (Prosedur Penilaian) bertujuan untuk mengevaluasi akuntabilitas dari hasil program yang telah terlaksana, dimana masyarakat bisa menilai apakah informasi yang disampaikan oleh aktor sesuai dengan kenyataan di lapangan dan melihat apakah hasil dari program sudah proporsional. Aspek **Prosedur Penilaian** dan peneliti melihat bahwa kurang optimal nya prosedur penilaian yang dikatakan oleh Mark Bovens, 2006 mengenai standar operasional prosedur dan kesesuaian fakta dilapangan terkait program yaitu penyelenggara program telah menyampaikan SOP dan merealisasikan rencana program yang telah disepakati Maka peneliti dapat melihat bahwa ada banyak faktor yang menyebabkan program ini tidak berhasil dan tidak mencapai tujuan yang telah ditetapkan diantaranya yaitu: kurangnya penanganan dan peretanggungjawaban dari pihak desa setelah program ini selesai dibangun, kekurangan pipa induk di beberapa rumah warga, dan kurangnya respon masyarakat terhadap program PAMSIMAS I ini baik dari segi evaluasi maupun kepedulian merawat bangunan dari program ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengamatan serta penelusuran peneliti melalui wawancara mendalam bersama informan dan data serta literatur ditemukan oleh peneliti **pertama aspek *prover provision of information* (ketersediaan informasi)** diketahui penyampaian informasi mengenai program belum mencakup keseluruhan sehingga tidak semua masyarakat mengetahui dengan jelas seputar program, Sehingga masyarakat juga tidak dapat menilai apakah realisasi program sesuai dengan perencanaan sebelumnya. **Kedua pada aspek *Proper Debate* (ruang diskusi)** dapat dilihat dari ruang diskusi sudah cukup terbuka dan diberikan kesempatan dalam berinteraksi namun kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan pendapat dan tidak adanya ruang diskusi kembali setelah program ini mulai dilaksanakan. **Ketiga pada aspek *Proper Judgment Procedure* (Penilaian yang tepat)** dimana masyarakat yang cenderung kurang responsive terhadap hasil dari program ini sehingga tidak adanya evaluasi terhadap keberhasilan, keberlanjutan dan pertanggungjawaban program sehingga

itulah yang membuat program PAMSIMAS di desa Wanamukti Barat ini belum berhasil dan belum memiliki akuntabilitas yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, B. I., & Sugiri, A. (2014). *Ketersediaan air bersih dan perubahan iklim: Studi krisis air di Kedungkarang Kabupaten Demak. Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota)*, 3(2), 295-302.
- Afrilya, F., & Rahmawati, A. (2014). Program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat di Desa Tiris Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo.
- Bovens, Mark. 2006. Analysing and Assessing Public Accountability. A Conceptual Framework. European Governance Papers (EUROGOV) No. C-06-01, <http://www.connex-network.org/eurogov/pdf/egp-connex-C-06-01.pdf>
- Nugroho, Alih Aji. (2018). *Paradigma Administrasi Publik*. Jurnal Ilmu Administrasi Publik.
- Pamsimas, 2010. *Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat*. Diakses dari <https://pamsimas.pu.go.id/sdgs-sebagai-upaya-penyediaan-air-minum-aman-konsumsi/> diakses pada tanggal 09 Juli 2022; 12:10 WITA



VOL. 01, NO.01, 2024
ISSN:XXXX-XXXX (ONLINE)